



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I WAYAN SUJA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN II
3. NHK : 851699

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **770.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/108 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **367.000.000**

1. MOTOR, HONDA NC12A1CFA/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA K1HO2N14LOA/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DPRA/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
4. MOTOR, HONDA A1F02N36M1A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
6. MOBIL, MITSUBISHI XFC ULTIMATE 1,5L Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **130.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	74.998.418
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.341.998.418
III. HUTANG	Rp.	528.448.220
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	813.550.198

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.